

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR SEPARATIS DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT



Oleh:

Trisno Romo Santoso

NPM: 12124011

**PRODI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini Telah Direvisi
Pada Tanggal 19 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing



Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama



Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL: 30 Januari 2026



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Surabaya, 16 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Trisno Romo Santoso

NPM: 12124011

ABSTRAK

Dalam upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai pemaknaan hak didahulukan bagi kreditur separatis dan bagaimana pembagian harta hasil penjualan objek jaminan kepada kreditur koheren dengan asas *droit de preference*. Kreditur separatis memiliki kedudukan istimewa sebagai pemegang hak jaminan kebendaan (Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, atau Hipotek), namun dalam praktiknya sering terjadi benturan kepentingan dengan hak-hak prioritas lainnya seperti upah buruh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif guna menemukan koherensi antara regulasi kepailitan dengan hukum jaminan sektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna didahulukan bagi kreditur separatis adalah pengakuan validitas jaminan dalam kondisi krisis finansial debitur, di mana mereka dapat mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, meski dibatasi oleh masa penangguhan (*stay*) selama 90 hari. Perlunya sinkronisasi dan pengawasan ketat oleh Kurator dan Hakim Pengawas sangat krusial agar proses penjualan aset jaminan dilakukan secara transparan dan optimal guna melindungi hak seluruh kreditur dalam koridor keadilan kolektif.

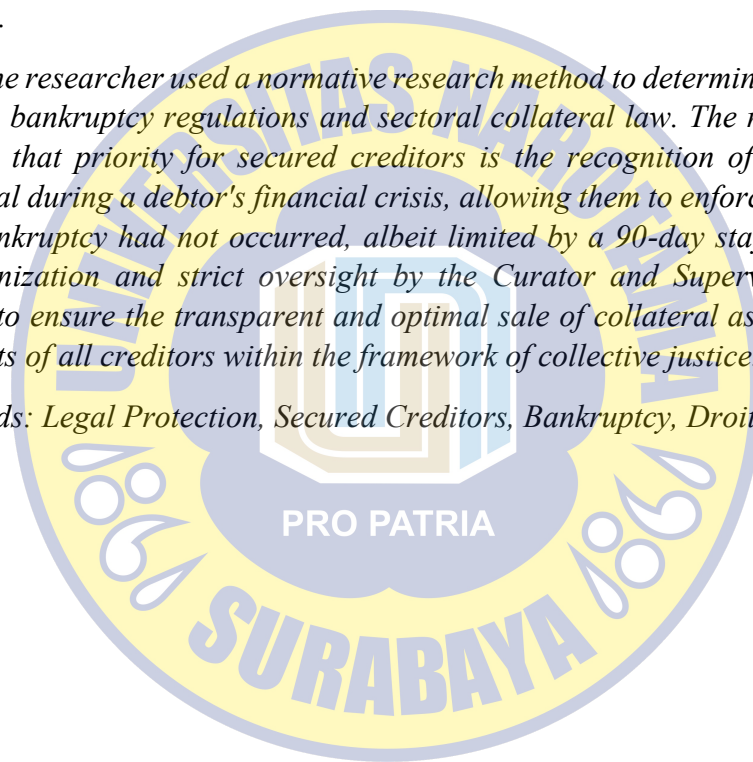
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur Separatis, Kepailitan, Droit de Preference.

ABSTRAC

In an effort to ensure legal certainty in the Indonesian bankruptcy legal system, this has been affirmed through Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The main issue in this research is the meaning of priority rights for secured creditors and how the distribution of assets from the sale of collateral to creditors is consistent with the principle of droit de preference. Secured creditors have a privileged position as holders of collateral rights (Mortgage Rights, Fiduciary Rights, Pawns, or Mortgages), but in practice, their interests often conflict with other priority rights, such as labor wages, following Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013.

The researcher used a normative research method to determine the coherence between bankruptcy regulations and sectoral collateral law. The research results indicate that priority for secured creditors is the recognition of the validity of collateral during a debtor's financial crisis, allowing them to enforce the collateral as if bankruptcy had not occurred, albeit limited by a 90-day stay. The need for synchronization and strict oversight by the Curator and Supervisory Judge is crucial to ensure the transparent and optimal sale of collateral assets, protecting the rights of all creditors within the framework of collective justice.

Keywords: Legal Protection, Secured Creditors, Bankruptcy, Droit de Preference.



RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR SEPARATIS DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

BAB I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar peneliti mengenai fakta hukum kepailitan yang melahirkan isu hukum terkait posisi kreditur separatis. Isu hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah mengenai makna didahulukan dan koherensi pembagian harta dengan asas *droit de preference*. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep perlindungan hukum yang ideal bagi pemegang jaminan kebendaan. Diterangkan pula metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) serta sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

BAB II, Membahas rumusan masalah pertama yaitu dengan judul bab Makna Didahulukan Bagi Kreditur Separatis Dalam Pembagian Harta Pailit. Pada bab ini dibahas terkait kedudukan istimewa kreditur separatis berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU yang memberikan hak eksekusi mandiri. Dibahas pula mengenai batasan-batasan hukum seperti masa penangguhan 90 hari, batas waktu eksekusi dua bulan, serta pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terkait upah buruh yang mulai menggeser sifat absolut hak separatis demi nilai kemanusiaan.

BAB III, Pembahasan atas rumusan kedua yaitu dengan judul bab Pembagian Harta Hasil Penjualan Objek Jaminan Kreditur Kepada Kreditur Koheren Dengan Asas *Droit De Preference*. Bab ini membahas mekanisme teknis penjualan objek jaminan melalui lelang umum atau di bawah tangan, peran Kurator dalam mengelola hasil penjualan, serta urutan prioritas pembagian. Selain itu, dibahas mengenai status kreditur separatis yang berubah menjadi konkuren jika terjadi defisit hasil penjualan, serta pentingnya transparansi daftar pembagian guna menghindari sengketa hukum antar golongan kreditur.

BAB IV, Merupakan bagian penutup yang dimuat kesimpulan bahwa hak prioritas separatis adalah pilar stabilitas ekonomi namun tetap tunduk pada pengawasan hukum dan hak-hak sosial. Saran ditujukan untuk harmonisasi regulasi antara UU KPKPU dengan UU Jaminan sektoral serta standarisasi biaya kepailitan untuk meminimalisir perselisihan dalam praktik pemberesan

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Arasy Alimudin, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. Miftakhul Huda, S.H., M.H. Selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun
4. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu ada dihati penulis sebagai motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada istri dan anak penulis yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
7. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Hormat Saya,

Trisno Romo Santoso



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
TIM PENGUJI TESIS	III
FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS.....	IV
FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS	V
FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS	VI
SURAT PENUGASAN	VII
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS.....	VIII
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL.....	X
KARTU KEHADIRAN PROPOSAL.....	XI
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILIAN PROPOSAL TESIS.....	XII
KARTU BIMBINGAN TESIS	XIII
FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS.....	XV
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI	XVI
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	XVIII
ABSTRAK.....	XIX
<i>ABSTRAC</i>	XX
RINGKASAN	XXI
KATA PENGANTAR	XXII
DAFTAR ISI.....	XXIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Keaslian Penelitian.....	16
1.7 Metode Penelitian.....	18
1.8 Sistematika Penulisan.....	20

BAB II MAKNA DIDAHULUKAN BAGI KREDITUR SEPARATIS DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT	22
2.1 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis Dalam Pemberasan Harta Pailit.....	22
2.2 Makna Didahulukan Bagi Kreditur Separatis Dalam Pembagian Harta Pailit	37
BAB III PEMBAGIAN HARTA HASIL PENJUALAN OBJEK JAMINAN KREDITUR KEPADA KREDITUR KONKUREN DENGAN ASAS DROIT DE PREFERENCE.....	53
3.1 Pembagian Harta Pada Hasil Penjualan Objek Jaminan Dalam Kepailitan	53
3.2 Pembagian Harta Hasil Penjualan Objek Jaminan Kreditur Kepada Kreditur Koheren Dengan Asas Droit De Preference	65
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR BACAAN.....	78

